



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 120/18.13/ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Menetapkan Status Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jumlah luas Fungsional Daerah Irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai adalah : 38.125 Ha dan 47 Daerah Irigasi (D.I) dengan rincian:  
1. 20.892 Ha (54,90%) dan 6 D.I merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.  
2. 7.323 Ha (19,21%) dan 6 D.I merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.  
3. 9.910 Ha (25,99%) dan 35 D.I merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

  
BASYARUDDIN, SH  
PEMBINA  
NIP. 197009171998301005

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 120/18.13/ TAHUN 2019

TANGGAL : 06-Feb-19

TENTANG : PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**DAFTAR DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA DAERAH IRIGASI (D.I.)	KECAMATAN	LUAS (HA)		
			Luas Potensial	Luas Fungsional	Luas Non Fungsional
1	D.I KAMPUNG BARU	TANJUNG BERINGIN	219,58	189,88	29,7
2	D.I PEMATANG CERMAI	TANJUNG BERINGIN	479,89	346,21	133,68
3	D.I PEMATANG TERANG	TANJUNG BERINGIN	844,04	748	96,04
4	D.I TEBING TINGGI	TANJUNG BERINGIN	861,92	623	238,92
5	D.I SEI PARIT	SEI RAMPAH	241,75	186,45	55,3
6	D.I TAPIAN NAULI	SEI RAMPAH	358,66	180,25	178,41
7	D.I PEMATANG GANJANG	SEI RAMPAH	900,41	632,49	267,92
8	D.I MALASORI	DOLOK MASIHUL	110,98	91,5	19,48
9	D.I JUHAR	BANDAR KHALIFAH	701,51	616,23	85,28
10	D.I SEI PINANG	BANDAR KHALIFAH	688,58	541,58	147
11	D.I KAYU BESAR	BANDAR KHALIFAH	501,96	375	126,96
12	D.I BUKIT CERMIN	DOLOK MASIHUL	0	Tidak Aktif	Tidak Aktif
13	D.I PERTAMBATAN	DOLOK MASIHUL	0	Tidak Aktif	Tidak Aktif
14	D.I CINTA KASIH	DOLOK MASIHUL	0	Tidak Aktif	Tidak Aktif
15	D.I KERAPUH	DOLOK MASIHUL	45,99	34,48	11,51
16	D.I SUMBER REJO	DOLOK MASIHUL	49,64	35,38	14,26
17	D.I SILAU MERAWAN	DOLOK MASIHUL	0	Tidak Aktif	Tidak Aktif
18	D.I ARAS PANJANG	DOLOK MASIHUL	57,95	40,66	17,29
19	D.I PACAR MANIK	SILINDA	8,28	8,28	0
20	D.I PAMAH	SILINDA	71,39	62,86	8,53
21	D.I SEI BUAYA	SILINDA	151,43	84,43	67
22	D.I KULASAR	SILINDA	38,44	30,76	7,68
23	D.I DURIAN KONDOT	KOTARIH	8,5	2,3	6,2
24	D.I DOLOK MASANGO	BINTANG BAYU	0	Tidak Aktif	Tidak Aktif
25	D.I SUKA DAMAI	SEI BAMBAN	729,47	471,32	258,15
26	D.I SIRIA-RIA BLOK IV	SEI BAMBAN	1835,33	948,29	887,04
27	D.I SEI MARTEBING	TEBING TINGGI	153,29	123,78	29,51
28	D.I BARON	TEBING TINGGI	74,92	49,99	24,93
29	D.I PAYA MABAR	TEBING TINGGI	140,47	124,73	15,74
30	D.I APRAS	TEBING TINGGI	343,43	257,9	85,53
31	D.I PENGGALIAN	TEBING SYAHBANDAR	94,11	58,7	35,41
32	D.I PENGGALANGAN	TEBING SYAHBANDAR	137,66	121,01	16,65
33	D.I BINJAI	TEBING SYAHBANDAR	60,9	52,33	8,57
34	D.I SIMALAS	SIPIS-PIS	0	Tidak Aktif	Tidak Aktif
35	D.I PARITOKAN	DOLOK MARAWAN	0	Tidak Aktif	Tidak Aktif
<b>JUMLAH</b>		<b>35 D.I (25.99%)</b>	<b>9.910,48</b>	<b>7.037,79</b>	<b>2.872,69</b>

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETANAB SERDANG BEDAGAI

BASYAR UDDIN, SH  
PEMBINA  
NIP. 197009171998301005